

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan BAB IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Memperoleh Opini WTP Berdasarkan Analisis Rasio

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian menunjukkan pola Insruktif dan dikategorikan rendah sekali untuk setiap pemerintah daerah pada tahun 2013 dan 2014. Perbandingan tahun 2013 dengan 2014 menunjukkan tren peningkatan atau kenaikan kecuali satu daerah.

b. Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

Berdasarkan rasio efektifitas penerimaan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2013, rasio efektifitas rata-rata telah dikategorikan sangat efektif, kecuali empat daerah. sedangkan pada tahun 2014, rata-rata juga telah dikategorikan sangat efektif kecuali satu daerah. tren yang ditunjukkan adalah tren kenaikan kecuali dua daerah.

c. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja daerah, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 dan 2014, rasio efisiensi rata-rata dikategorikan kurang efisien kecuali tiga daerah. Tren yang ditunjukkan adalah tren penurunan namun ada empat daerah yang mengalami kenaikan.

5.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Memperoleh Opini WTP Berdasarkan Analisis Rasio

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian masih menunjukkan pola Instruktif dan dikategorikan masih rendah sekali untuk tahun 2015 dan 2016. Tren yang ditunjukkan cenderung turun dari tahun 2015, kecuali empat daerah.

b. Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas penerimaan PAD, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 rata-rata rasio efektifitas telah dikategorikan sangat efektif. Tapi, ada 4 daerah yang belum efektif.

Pada tahun 2016, terdapat data yang berbeda, yaitu rata-rata rasio efektifitas dikategorikan kurang efektif, tapi ada satu daerah yang dikategorikan sangat efektif.

c. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja daerah, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja dari periode sebelumnya.

Pada tahun 2015, rata-rata rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien, dan ada empat daerah yang tidak efisien. Pada tahun 2016, rata-rata rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, dan hanya ada tiga daerah yang dikategorikan kurang efisien.

5.1.3 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Memproleh Opini WTP

Berdasarkan hasil yang dihitung menggunakan rasio pertumbuhan PAD, dapat diketahui bahwa pada saat pemerintah daerah belum memproleh opini WTP, hasil rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif. Semua daerah menunjukkan hasil yang positif dan angka yang dihasilkan juga relatif tinggi untuk setiap daerah. Rata-rata yang dihasilkan adalah 44,77%. Hal tersebut berarti pemerintah berhasil mempertahankan keberhasilannya

Namun, pada tahun 2016, terjadi penurunan kinerja pemerintah daerah. hal tersebut dapat diketahui dari tren yang ditunjukkan masing-masing pemerintah daerah. terdapat empat daerah yang menunjukkan hasil negatif yang berarti bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu mempertahankan pencapaian yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Tujuh daerah lain yang mendapatkan hasil

positif mengalami penurunan hasil dari sebelum memperoleh opini WTP. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah tersebut gagal meningkatkan keberhasilan yang telah di capai pada tahun sebelumnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dipakai data sekunder, bukan data primer yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah dan BPK-RI Sumatera Barat.
2. Penelitian hanya berlaku secara regional yang terbatas pada Provinsi Sumatera Barat.
3. Objek penelitian yang memenuhi kriteria hanya terdiri dari sebelas daerah dari sembilan belas kab. Dan kota di Sumatera Barat.
4. Penelitian ini terbatas pada penggunaan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas penerimaan PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan PAD.
5. Penelitian ini tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi, keadaan sosial masyarakat, dan politik pada daerah yang menjadi objek penelitian

5.3 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat mengobservasi atau mengkonfirmasi secara langsung terhadap masing-masing pengelola keuangan Pemerintah Daerah melalui wawancara orang yang lebih memahami masalah yang sedang diteliti.

2. Hasil penelitian dapat digeneralisir secara nasional jika penelitian dilanjutkan dengan memperluas ruang lingkup sampai seluruh Indonesia.
3. Untuk setiap Pemerintah Daerah, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan sumber pendapatan daerah yang ada atau menambah sumber pendapatan daerah yang baru serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat melalui dana perimbangan supaya terwujudnya kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, karena tingkat kemandirian setiap pemerintah daerah masih rendah sekali.
4. Untuk Pemerintah Daerah yang telah dikategorikan sangat efektif merealisasikan penerimaan PAD dari target PAD yang telah diestimasikan diharapkan dapat mempertahankan dari tahun ke tahun berikutnya agar kinerja keuangan dinilai baik. Dan untuk Pemerintah Daerah yang belum efektif atau masih belum stabil dari tahun ke tahun, diharapkan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.
5. Untuk setiap Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan efisiensi belanja daerah agar hasil perbandingan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah dapat efisien.
6. Untuk setiap Pemerintah Daerah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya supaya tidak ada terdapat penurunan hasil atau benilai negatif.

